HUKUM WARIS DALAM ISLAM: DARI ERA KLASIK HINGGA KONTEMPORER

¹ Muhammad Barrunnawa, ² Berlian Fajrul Falakh, ³ Firdha Setyawan Maslakul Huda
¹²³ UIN Sunan Kalijaga

¹ muhammadbarrunnawa9572@gmail.com, ² berlianfajrul3@gmail.com, ³ fisemada@gmail.com

Diterima: 25 Mei 2021

Direvisi: Mei-Juli 2021

Diterbitkan: 16 Agustus 2021

ABSTRACT

This study aims to explain the renewal of Islamic inheritance law that has occurred since the era of companions until now. This type of research is qualitative with a normative-historical approach, by describing some facts of changes in inheritance law that occurred from the companions era to the modern era. By looking at the existing reality, it can be said that the current renewal of inheritance law is not a new thing, and it is possible that Islamic inheritance law will continue to develop according to the conditions of the times. The purpose of updating inheritance law is a response from every Islamic country to social developments in each country so that inheritance law continues to exist without causing social inequality.

Keyword: Evolution; Islamic Inheritance Law; orphaned grandchildren

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembaruan hukum waris Islam yang terjadi sejak era sahabat hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan). Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-historis, dengan memaparkan beberapa fakta perubahan hukum waris yang terjadi dari era sahabat hingga era modern. Dari kajian yang dilakukan, dapat diketahui bahwasannya pembaruan hukum waris saat ini bukan merupakan hal yang baru, serta tidak menutup kemungkinan hukum waris Islam akan terus berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Tujuan pembaruan hukum waris merupakan respon dari setiap negara Islam terhadap perkembangan sosial di masing-masing negara agar hukum waris tetap eksis tanpa menimbulkan ketimpangan sosial.

Kata Kunci: Perkembangan; Hukum Waris Islam; Cucu Yatim

PENDAHULUAN

Reformasi di bidang hukum Islam tidak hanya terjadi di era modern saat ini, seperti yang terjadi di beberapa negara Islam yang telah membuat kodifikasi hukum perdata baik berupa perundang-undangan maupun kompilasi, seperti; Mesir, Maroko, Syiria, Tunisia, Indonesia dan negara Islam lainnya. Dari sekian pembaruan hukum Islam, hukum waris merupakan hukum yang banyak menuai penolakan sehingga pembaruannya sangat lambat. Hingga saat ini, hukum waris dianggap memiliki imunitas paling kuat dibandingkan hukum perdata lain.

Pembaruan di dalam hukum waris akan sulit dilakukan karena setiap aturan mengenai waris saling berkaitan erat sehingga pembaruan akan berdampak pada perubahan tatanan aturan waris yang telah mapan. Selain itu, aturan mengenai hukum waris tertulis secara jelas dan pasti di dalam sumber hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan secara detail siapa saja yang mendapatkan harta waris dan jumlah harta yang didapatkan ahli waris. Disadari ataupun tidak, pembaruan hukum waris telah ada sejak zaman para sahabat. Menengok sejarah, para sahabat mampu berkreasi dalam ijtihad ketika dihadapkan dengan masalah waris masyarakat Islam pada saat itu. Namun hal ini sulit diterapkan bagi masyarakat modern ini karena para sahabat pada saat itu mempunyai keutamaan yang dilegitimasi langsung oleh Nabi Muhammad. Secara teologis masyarakat muslim saat ini memiliki keyakinan bahwa umat muslim pada era sahabat memiliki keutamaan dibandingkan masyarakat muslim setelahnya. Nabi Muhammad pernah bersabda "*Khoiru an-nâsi qaranî tsumma allażîna jalûnahum tsumma allażîna jalûnahum*" (Muslim 2006). Selain faktor sakralitas terhadap hukum waris, perubahan struktur sosial yang ada di

masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pembagian harta kepada ahli waris.

Selain itu, jika dilihat polemik ini lebih dalam terdapat perbedaan sistem kekeluargaan masyarakat zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Sistem kekeluargaan yang ada di masyarakat zaman dahulu menganut sistem kekeluargaan *extended family*, sedangkan pada era modern ini masyarakat cenderung menganut sistem kekeluargaan *nuclear family* (Wahib 2014:42). Sistem kekeluargaan ini dianggap hal penting karena berdampak pada peran dan tanggung jawab seorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, yang selanjutnya juga akan berdampak pada pembagian waris bagi ahli waris.

Perubahan struktur sosial yang terjadi saat ini perlu juga diimbangi dengan aturan hukum yang sesuai. Antara sistem kekeluargaan dengan hukum waris harus berbanding lurus karena hubungan antara keduanya sangat erat. Dengan kata lain, ketimpangan sosial akan terjadi apabila hukum waris tidak dapat mengikuti perkembangan sosial di masyarakat. Seperti yang terjadi di beberapa negara Islam seperti Mesir yang membuat aturan baru tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu karena adanya ketidakadilan terhadap harta waris yang dibagi. Langkah yang dilakukan Mesir kemudian diikuti oleh negara-negara Islam lainnya, termasuk juga Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membandingkan dengan karya-karya ilmiah sebelumnya. Selain itu penulis juga menggali informasi dari karya-karya tersebut sebagai rujukan dalam penelitian. Dari beberapa penelitian yang ada penulis mencoba untuk memaparkan karya ilmiah yang berhubungan erat dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang berjudul *Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim* oleh

Ahmad Bunyan Wahiib. Dalam penelitian ini penulis membahas perubahan sifat hukum waris yang yang awalnya dianggap dinamis berubah menjadi statis. Dalam memaparkan penelitiannya, penulis menggunakan pendekatan antropologi tanpa menjabarkan secara detail tentang kasus-kasus perubahan waris di era tabi'in dan sahabat. Penelitian ini fokus terhadap perubahan waris di berbagai negara Islam dan pentingnya pemahaman terhadap keluarga inti dalam hukum waris. Penelitian lain yang berjudul *Reformasi Hukum Waris Islam Melalui Wasiat Wajibah, Bagi Ahli Waris Non Muslim Di Negara Islam Dan Mayoritas Islam*. Penelitian menggunakan pendekatan normatif diskriptif dengan menjelaskan wasiat wajibah di dunia Islam, baik dari segi perbedaannya, cara pengambilan hukum dan perbedaan aturannya.

Selain dari kedua penelitian ini masih ada banyak penelitian lain yang membahas tentang hukum waris. Artikel ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan menekankan aspek sosiologi dan fakta sejarah dari masa sahabat hingga era modern saat ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Padapenelitian ini penulis menggunakan metodelibrary research (studi kepustakaan), dengan membaca karya ilmiah terdahulu(Raihan 2019:67), seperti buku, artikel, jurnal atau hasil laporan dari penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-historis. Pendekatan historis dianggap penting karena agama turun dalam keadaan konkrit dan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat(Haryanto 2017:127). Penelitian ini akan memaparkan sejarah perkembangan hukum waris Islam dari masa sahabat hingga era modern. Selain itu penulis juga akan memaparkan beberapa gejala sosial yang

terjadi dalam ruang lingkup penelitian ini, karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Dengan pendekatan sejarah dan sosiologi ini akan mempermudah penulis dalam menganalisis persoalan dalam hukum Islam(Ishak 2013:65). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah berupa data-data berupa kitab-kitab fikih, artikel, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan hukum waris Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaruan Hukum Waris di Masa Sahabat

Nabi Muhammad pernah bersabda "*Afradukum Zaid*". Hadis ini dianggap sebagai *nash* yang melegitimasi otoritas Zaid sebagai salah satu pakar ilmu waris pada saat itu. Hukum waris yang ada dalam kitab fikih klasik khususnya aliran mazhab Syafi'i merupakan turunan dari pendapat Zaid bin Tsabit(Kocinkag 2018:336). Zaid dalam sebuah risalahnya telah melakukan beberapa pembaruan hukum waris, dimana praktiknya tidak sama persis dengan aturan di al-Qur'an. Salah satu pembaruan hukum waris yang dilakukan olehnya adalah kasus *akdariyyah*. Ada dua pendapat mengenai sumber penamaan istilah *akdariyyah* ini. Pertama, karena kasus ini mengenai seorang perempuan yang berasal dari Bani *Akdar*. Kedua, karena kasus ini dianggap sebagai sebuah kasus waris yang mengotori nama baik Zaid dan pengikutnya.(Al-Bugho 1992:125). Kasus *akdariyyah* dianggap melenceng karena penyelesaian kasusnyakeluar dari kaidah baku dalam al-Qur'an. Kasus ini dapat terjadi apabila ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudara kandung atau saudara seayah dan kakek. Menurut perhitungan waris yang sesuai dengan al-

Qur'an, suami akan mendapatkan 1/2 harta, dan ibu mendapatkan 1/3, sedangkan sisa harta hanyalah 1/6 yang merupakan hak bagi kakek, karena bagian harta kakek tidak boleh kurang dari 1/6 (Al-Bugho 1992:119). Maka dari itu saudara perempuan tidak mendapatkan harta karena tidak ada harta yang tersisa.

Tabel 1 (Sesuai pembagian dalam al-Qur'an)

Ahli waris	Bagian	6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2
Kakek	1/6	1
Saudara perempuan kandung	-	-

Dari kasus ini, muncullah istilah '*aul*' dalam ilmu waris. '*Aul*' bertujuan untuk menolong saudara perempuan kandung agar mendapatkan harta dari mayit. Jika mengikuti metode *akdariyyah*, maka saudara perempuan kandung akan mendapatkan 1/3 harta. Setelah saudara perempuan mendapatkan bagian, maka bagiannya digabung dengan kakek. Suami mendapatkan 3, ibu mendapatkan 2, kakek dan saudara mendapatkan 4. lalu asal masalah harus disesuaikan sehingga mendapatkan 27. Dari asal masalah 27, maka suami mendapat 9 bagian, ibu mendapat 6 bagian, kakek dan saudara perempuan kandung mendapatkan 12 bagian yang dibagi dengan perbandingan 1:2, maka kakek mendapatkan 8 bagian dan saudara perempuan mendapatkan 4 bagian.

Tabel 2 (Metode *Akdariyyah*)

Ahli Waris	Bagian	6	9	27	27
Suami	1/2	3	3	9	9
Ibu	1/3	2	2	6	6
Kakek	1/6	1	4	12	8
Saudara perempuan kandung	1/3	3			4

Selain Zaid bin Tsabit, Umar bin Khattab juga melakukan pembaruan dalam hukum waris. Salah satu pembaruan yang dilakukan oleh Umar dapat dilihat pada kasus '*Umariyatain*'. Kasus *umariyyatain* ini tidak hanya disebut sebagai pembaruan terhadap tata cara pengeluaran harta waris, akan tetapi juga memberikan bilangan baru dalam pembagian waris. Di dalam al-Qur'an, bagian harta yang akan didapatkan oleh ahli waris ada enam yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 dari seluruh harta, sedangkan kasus ini, Umar memberikan jumlah baru yaitu 1/3 sisa (Al-Bugho 1992:201).

Hal di atas dikarenakan jumlah harta yang akan didapatkan oleh seorang ayah lebih sedikit dari pada jumlah harta yang akan diterima oleh seorang ibu. Pertimbangannya adalah bahwa laki-laki harus mendapatkan harta dua kali lipat dari bagian yang didapatkan perempuan. Kasus ini terjadi apabila ahli waris terdiri dari suami atau istri, ayah, dan ibu. Jika mengikuti aturan waris sesuai dengan al-Qur'an maka bagian suami 1/2 harta, ibu 1/3 harta dan ayah mendapatkan '*asabah*', atau istri mendapatkan 1/4 harta, ibu 1/3 harta dan ayah mendapatkan '*asabah*'. Lebih jelasnya dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 3 (Pembagian sebelum *Ummariyyatain* Suami)

Ahli waris	Bagian	6
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	2
Ayah	Asabah	1

Tabel 4 (Pembagian sebelum *Ummariyyatain* Istri)

Ahli Waris	Bagian	12
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	4
Ayah	Asabah	5

Pada saat itu, pembagian ini dianggap tidak sesuai dengan semangat waris Islam, karena harusnya jumlah harta yang didapatkan laki-laki tidak hanya lebih banyak, melainkan juga harus mengikuti kaidah 2:1. Pada contoh (tabel 3) harta yang didapatkan ayah lebih sedikit dibandingkan harta yang didapatkan oleh ibu, sedangkan pada contoh (tabel 4), harta yang didapatkan oleh ibu dan ayah tidak sesuai dengan perbandingan 2:1. Untuk mengatasi hal itu maka Umar berpendapat bahwa harta waris yang didapatkan ibu bukan $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta waris, melainkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta yang telah diambil oleh suami atau istri.

Tabel 5 (*Ummariyyatain* Suami)

Ahli waris	Bagian	6	6
Suami	$\frac{1}{2}$	3	3
Ibu	-	$\frac{1}{3}$ dari 3	1
Ayah	-	$\frac{2}{3}$ dari 3	2

Tabel 6 (*Ummariyyatain* Istri)

Ahli waris	Bagian	12	12
Istri	$\frac{1}{4}$	3	3
Ibu	-	$\frac{1}{3}$ dari 9	3
Ayah	-	$\frac{2}{3}$ dari 9	6

Kasus *yammiyah* atau yang juga sering disebut sebagai *hajariyyah*. Kasus ini muncul atas aduan seseorang yang tidak mendapatkan harta waris, sedang ia adalah saudara kandung dari orang yang meninggal. Sehingga Umar yang pada saat itu menjadi khalifah untuk membuang status ayah dan membaurkan saudara kandung dengan saudara seibu untuk mendapatkan harta secara kolektif. Status ayah dihilangkan seperti halnya batu yang dibuang dilautan, sehingga kasus ini dinamakan *yammiyah* (laut) atau *hajariyyah* (batu) (Al-Bugho 1992:113). Kasus ini muncul apabila ahli waris terdiri dari suami, ibu saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan, baik satu atau banyak), dan saudara laki-laki kandung. Jika mengikuti kaidah yang ada di dalam al-Qur'an, maka saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan harta waris karena harta waris telah diambil oleh *ashāb al-furūd*.

Tabel 7 (Pembagian sebelum *Yammiyah*)

Ahli Waris	Bagian
Suami	$\frac{1}{2}$
Ibu	$\frac{1}{6}$
Saudara (Laki-Laki Atau Perempuan)	$\frac{1}{3}$
Saudara Laki-Laki Kandung	-

Pendapat Umar mengenai kasus ini adalah dengan menyatukan status saudara seibu dengan saudara laki-laki sekandung.

Posisi saudara laki-laki sekandung dianggap sebagai saudara seibu, dan harta dari mereka dibagi secara merata.

Tabel 8 (Yammiyah)

Ahli Waris	Bagian
Suami	$\frac{1}{2}$
Ibu	$\frac{1}{6}$
Saudara (Laki-Laki Atau Perempuan)	$\frac{1}{3}$
Saudara Laki-Laki Kandung	

Kasus-kasus di atas merupakan kasus yang pernah terjadi di masa para sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw. Hingga saat ini aturan mengenai kasus ini masih dikaji dan dapat ditemui di dalam literatur-literatur klasik. Selain kedua kasus ini masih ada banyak kasus-kasus lain yang memaksa para *mujtahid* pada waktu itu untuk berkreasi dalam menyelesaikan persoalan waris yang dianggap tidak sesuai dengan semangat Islam. Daintaranya seperti kasus *mubâhalah*, *minbariyyah*, *keburaqâ'*, *syurairihiyyah*, *umm al-aramil*, *marvaniyyah* dan juga kasus *dinariyyah*. Kasus-kasus yang disebutkan ini merupakan beberapa kasus yang dalam praktiknya keluar dari kaedah mapan dalam al-Qur'an. (Al-Bugho 1992).

Perkembangan Hukum Waris Pasca Era *Jumûd*

Era *jumûd* atau juga disebut sebagai era *taqlid* merupakan era di mana pembahasan ilmu fikih cenderung stagnan. Pada masa ini pintu *ijtihad* dianggap telah ditutup (Dr Nasr farid muhammad Wasil- n.d.:134). Para pakar fikih pada masa ini dianggap tidak mampu mencapai derajat sebagai *mujtahid mutlaq* (Dr Nasr farid muhammad Wasil- n.d.:136).

Mereka hanya diperbolehkan berijtihad sesuai dengan jalan pikir pemimpin mazhab mereka masing-masing.

Pada pertengahan abad ketiga hingga awal abad keempat *hijriyyah* pembaruan hukum mulai muncul. Salah satu tokoh pembaru dalam bidang ilmu waris adalah Ibn Hazm. Dia merupakan salah satu ulama terkenal dari mazhab *Dzahiriyyah*. Salah satu pendapatnya yang masyhur dalam khazanah ilmu waris adalah konsep wasiat wajibah. Pendapatnya mengenai konsep ini menuai banyak kecaman karena dianggap lemah dan ditentang oleh para *fuqahâ'* pada masa itu. Akan tetapi konsep wasiat wajibah justru diterima di era modern ini dan diterapkan di berbagai belahan dunia muslim dengan berbagai variasinya. Berikut akan dipaparkan *istinbât* Ibn Hazm dan juga dalil-dalil penolakan para *fuqahâ'* terhadap wasiat wajibah.

Wasiat wajibah merupakan buah dari penafsiran Ibn Hazm terhadap surat al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

Selain merujuk kepada ayat tersebut, Ibn Hazm juga memperkuat pandangannya tentang kewajiban berwasiat menggunakan beberapa hadis, diantaranya:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا
حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ بَيِّتٌ لِيكَلِّتَنِ
إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ " .

Menceritakan kepadaku Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, maka tidak dibenarkan berdiam diri selama dua malam, melainkan wasiat itu telah tertulis di sisinya (Nisâburiy 2000:713).

وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي
صلى الله عليه وسلم : إن أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا
وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ، تَصَدَّقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ
تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ" ((متفق عليه))

Dari Aisyah ra. sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shalallahu Alaihi WaAlihi Wa Shahbihi Wasalam: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal, dan saya yakin jika ia masih hidup pasti bersedekah. Apakah ia dapat memperoleh pahala, jika saya ber-sedekah atas namanya. "Nabi Shalallahu Alaihi WaAlihi Wa Shahbihi Wasalam menjawab: "Ya, tentu mendapat pahala (Nisâburiy 2000:716).

Bagi para *fuqahâ, nâs* yang digunakan sebagai dasar hukum wasiat wajibah tidak bisa diterima dengan beberapa pertimbangan (Abubakar 1998:191). *Pertama*, ayat wasiat telah dihapus oleh ayat-ayat mawaris. Pendapat ini hampir disetujui oleh para *mufasssir*. *Kedua*, terdapat hadis yang menyatakan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada ahli waris. *Ketiga*, realitas sejarah, bahwa Nabi dan para sahabat tidak

pernah mempraktekan wasiat kepada ahli waris. Selain dengan pertimbangan di atas, para *fuqaha* juga memberikan penjelasan terkait pendapat Ibn Hazm (Abubakar 1998:192), yaitu:

" مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ بَيِّتٌ
لِيكَلِّتَنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ

1. Menurut mereka riwayat ini telah mengalami perubahan kata yang menyebabkan perubahan pada makna. " له له شيء يوصى فيه " شيء يريد يوصى فيه
2. *Jumbûr* berpendapat bahwa riwayat tentang ini bukan mengenai wasiat, selain itu Nabi juga tidak pernah melakukan wasiat, Ibn Umar yang juga merupakan perawi hadis ini juga tidak mengamalkan wasiat (Abubakar 1998:191).

Dalam kitabnya al-Muḥallâ Ibn Hazm mengatakan pendapatnya terhadap kritik yang diberikan oleh *jumbûr*. Beliau memperkuat bahwa riwayat yang ia keluarkan sesuai dengan riwayat Mâlik bin Anas, begitu juga riwayat yang keluar dari mayoritas perawi hadis ini (Hazm; Abi; Muhammad 'Alî ibn Aḥmad ibn sa'îd ibn 1987:312). Mengenai riwayat tentang Ibn Umar maka dapat dikatakan bahwa itu tertolak, karena salah satu periwayat ini adalah Asyhal bin Hatim yang menyandang status *dhaij* (Hazm; Abi; Muhammad 'Alî ibn Aḥmad ibn sa'îd ibn 1987:313).

Ibn Hazm mewajibkan bagi setiap muslim untuk memberikan wasiat kepada kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan baik karena menjadi budak, atau murtad, ataupun karena mereka ter-*mahjûb*, atau mereka memang tidak mendapatkan harta waris. Apabila wasiat ini tidak ada maka hal ini wajib bagi ahli waris untuk memberikannya. dan apabila kerabatnya

banyak maka diperbolehkan untuk memilih tiga kerabat dan jumlah harta yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga harta, serta tidak perlu meminta pertimbangan dari ahli waris (Hazm; Abi; Muhammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn sa’id ibn 1987:317). Serta apabila seseorang berwasiat sepertiga kepada selain kerabatnya maka bagi selain kerabat mendapatkan sepertiga harta dari sepertiga yang diberikan kepada kerabat.

Perkembangan Hukum Waris Dunia Islam Modern: Wasiat Wajibah di Negara Muslim

Mesir merupakan negara pertama yang mengadopsi wasiat wajibah dan memasukkannya ke dalam undang-undang. Seperti yang telah diketahui bahwa wasiat wajibah ini berasal dari buah pemikiran Ibn Hazm. Wasiat wajibah adalah istilah yang digunakan oleh Mesir pada tahun 1946 untuk mengatasi adanya ketidakadilan apabila seorang cucu yatim tidak mendapatkan harta sepeserpun dari kakeknya yang meninggal dunia dikarenakan cucu telah ter-*mahjūb* oleh pamannya (anak dari kakek). Mesir mengadopsi konsep ini dan memasukkan ke dalam UU no. 77 Tahun 1946. Aturan mengenai wasiat wajibah di Mesir diatur di dalam pasal 76-78 (Wahbah 1985:121).

مادة (76) (حكم بدستوريتها بجلسة 4-4-1987 لصدورها قبل تعديل المادة 2 من الدستور، فلا يكون هناك مجال لبحث مدي تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية من عدمه) القضية رقم 46 لسنة 47 قضائية دستورية - نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 في 16-4-1987)

إذا لم يوص الميت لفرع ولده، الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما، بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته أو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله 0

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وأن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث، كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موته مرتبا كترتيب الطبقات. الوصية بزيادة أو بأقل لبعض من وجب لهم الوصية دون البعض.

(مادة 77) إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله 0 وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر، وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه، ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق عن ذلك فممنه وما هو مشغول بالوصية الاختيارية 0

(مادة 78) الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا, فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم, استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى, وإلا فممنه وما أوصى به لغيرهم 0

Poin penting yang dapat diambil dari undang-undang ini adalah *pertama* apabila ada seseorang mati meninggalkan keturunan anaknya yang telah meninggal terlebih dahulu atau mati secara bersamaan dan tidak memberikan wasiat, maka keturunan anak tersebut berhak atas harta seperti haknya anaknya si mayit ketika masih hidup dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga harta. Disyaratkan pula bahwa cucu ini bukan seorang ahli waris yang memang berhak mendapatkan waris, dan dipastikan bahwa cucu ini belum pernah mendapatkan harta dari kakeknya, apabila kakeknya telah memberikan harta dan belum mencapai batas sepertiga harta, maka boleh diberikan harta untuk memenuhi sepertiga. Wasiat wajibah bagi keturunan perempuan maka hanya untuk keturunan pertama dan bagi keturunan laki-laki maka wasiat wajibah ini berlaku bagi keturunan hingga tak terbatas. *Kedua*, apabila mayit berwasiat dan melebihi dari sepertiga harta, maka sisa dari sepertiga dianggap sebagai wasiat *ikhtiyariyyah*. Dan apabila kurang dari sepertiga maka harus disempurnakan sepertiga. *Ketiga*, Wasiat wajibah harus didahulukan dibandingkan dengan wasiat yang lain (Sayyid 2004:1120–21).

Coulson mengatakan bahwasanya jalan yang ditempuh Mesir merupakan *Quasi Ijtihad*, maksudnya bahwa isi dari aturan ini adalah hal yang baru, yang belum ditemukan pendapat yang serupa pada pendapat ulama

terdahulu, namun juga tidak bisa disebut sebagai ijtihad baru karena pendapat ini juga dikaitkan dengan pendapat ulama terdahulu. Istilah lain dikatakan oleh Yusuf Qardhawi (Abubakar 1998:195) bahwa wasiat wajibah yang ada di dalam UU Mesir merupakan sebuah kolaborasi dari ijtihad selektif dari segi istilah dan pengaitan dengan ulama terdahulu dan ijtihad kreatif dari segi isinya (Abubakar 1998:195).

Langkah pembaharuan yang dilakukan oleh Mesir kemudian diikuti oleh beberapa negara Islam lainnya seperti Syria, Tunisia, Maroko, Kuwait, Irak, Jordan. Akan tetapi pembaruan yang dilakukan negara Islam tersebut tidak serta merta meniru dengan persis, melainkan melakukan beberapa modifikasi sesuai dengan *ijtihād* masing-masing negara. Secara singkat dapat diperjelas sebagai berikut:

- a. Di Kuwait dalam *Qānūn al-Washīyah al-Wājibah* 1971 dan di Maroko dalam Hukum Keluarga Maroko tahun 2004 pasal 369-372 memberikan wasiat wajibah memuat empat pasal, sama halnya yang berlaku di Mesir (Hidayati 2012:86).
- b. Di Syria dan Jordan memberikan wasiat wajibah hanya kepada cucu atau keturunan dari anak laki-laki saja. Peraturan ini diambil karena mereka beranggapan bahwa keturunan dari anak perempuan adalah *dzawil arham*, maka dari itu mereka tidak akan mendapatkan selama masih ada *dzawil furūd* dan *‘ashabah* (Qublan 1971:60–62).
- c. Di Tunisia dan Irak wasiat wajibah berlaku bagi keturunan laki-laki dan perempuan, akan tetapi hanya terbatas pada generasi pertama saja (Hidayati 2012:87).

1. Ahli Waris Pengganti di Negara Muslim

Selain wasiat wajibah, terdapat metode lain untuk menyelesaikan kasus cucu yang tidak mendapatkan waris, yaitu dengan jalan ahli waris pengganti. Dari beberapa negara muslim di dunia setidaknya terdapat dua negara yang menggunakan metode ini, yaitu Pakistan dan Indonesia. Setelah Pakistan merdeka pada tahun 1947-1960, negara ini belum memiliki hukum keluarga yang sesuai dengan masyarakat mereka. Pada saat itu, mereka masih menggunakan hukum yang telah berlaku, yaitu hukum keluarga India. Sebagai bentuk upaya pembaruan hukum Islam, Pakistan membentuk komisi pembentukan hukum Islam (*Family Law Comitions*) pada Agustus 1955, dan dari sinilah lahir Ordonansi Hukum Islam (MFLO) atau disebut *Mudawwanah al-Aḥwal al-Syakhsyyah* (Zuhdi, Hi, and Hi 1972:45).

Salah satu prinsip hukum waris Islam yaituhubungan kekerabatan yang lebih dekat akan menghalangi hubungan kekerabatan yang jauh untuk mendapatkan harta waris. Hal inilah yang menyebabkan cucu yatim tidak mendapatkan harta waris dari kakeknya karena keberadaan anak atau paman dari cucu yatim. Mayoritas negara-negara Islam di timur tengah mencoba untuk memecahkan masalah ini dengan perangkat wasiat wajibah, akan tetapi badan legislatif di Pakistan lebih memilih jalan ahli waris pengganti sebagai solusi masalah tersebut. Masalah bagian cucu dalam *Chapter 4* dari Undang-undang Hukum Keluarga Muslim tahun 1961 di Pakistan telah memicu perdebatan yang sangat panas. Ini merupakan pembaruan hukum Islam yang luar biasa yang dilakukan di negara Islam di manapun. Para ulama' dan banyak ahli hukum Islam lainnya menolak atas pembaruan hukum waris ini. Para ulama tradisional

lebih memilih jalan yang ditempuh oleh Mesir dan mayoritas negara Islam lainnya dalam menyelesaikan masalah cucu ini, yaitu dengan wasiat wajibah, karena penggantian ini dianggap telah merubah tatanan aturan waris yang telah mapan.

Dalam perancangannya, undang-undang ini dimotori oleh sebagian besar Anggota Komisi Perkawinan dan Hukum Keluarga dari golongan sekuler dan lebih memilih pembagian harta waris untuk cucu harus diberikan (Munir 2014:5). Argumen utama yang mereka kemukakan untuk mendukung pembaruan ini adalah *pertama* tidak ada *nāsh* baik dari ayat Al-Qur'an atau hadits yang secara jelas mengatakan cucu yatim piatu tidak mewarisi harta benda kakeknya. *Kedua*, apabila kakek mewarisi harta dari cucunya meskipun ayah pewaris telah mendahuluinya, mengapa prinsip ini tidak bisa berlaku sebaliknya. *Ketiga*, al-Quran dan Sunnah selalu menunjukkan kepedulian kepada anak yatim dan harta benda mereka, dan pelarangan harta dari kakek kepada cucu melawan semangat al-Quran. Dan pada surat 4:11, kata *awlād* tidak hanya berarti anak, akan tetapi juga cucu (Munir 2014:5-7).

Berikut bunyi pasal dalam *Chapter 4* dari Ordonansi: "*In the event of the death of any son or daughter of the propositus before opening of succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time the succession opens, shall per stirpes receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive.*" (Munir 2014)5

Pembaruan ini ditentang keras oleh sejumlah ulama dengan beberapa pertimbangan, diantaranya (Munir 2014:8-9), *pertama* al-Qur'an telah mengatur pembagian harta waris, akan tetapi aturan baru ini memberikan bagian kepada orang-orang yang meninggal. Kita harus mengasumsikan bahwa

putra atau putri mayit masih hidup pada saat kematian mayit dan menerima harta waris seperti halnya ahli waris yang lain dan setelah itu barulah kita menganggap bahwa kematian putra dan putri mayit dan harta dari mereka diberikan kepada keturunannya.

Kedua, jika anak laki-laki atau perempuan yang meninggal memiliki bagian dalam waris, seharusnya diserahkan kepada ibu, ayah, istri atau suami dan juga anak-anaknya, dan tidak hanya diberikan kepada cucu. *Ketiga*, prinsip dari waris Islam tidak diberikan kepada yang tidak mampu atau diberikan kepada yang membutuhkan. Jika demikian, maka ahli waris yang kaya tidak akan mendapatkan warisan dan ahli waris yang miskin yang berhak atas harta waris. Keempat Tanzil al-Rahman berpendapat bahwa penafsiran pada ayat 4:11 pada kata *aulâd*. Di sini diartikan dengan dua gaya bahasa, yaitu makna sesungguhnya dan makna metaforis. Makna sesungguhnya adalah putra dan putri sedangkan makna metaforisnya adalah cucu, cicit buyut dan seterusnya. Makna metaforis dan makna asli tidak bisa digunakan secara bersamaan dalam konteks yang sama. Karena apabila makna aslinya memang digunakan maka tidak bisa untuk menggunakan makna metaforisnya.

Istilah ahli waris pengganti di Indonesia pertama kali diberlakukan sejak Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 tentang penyeberluasan Kompilasi Hukum Islam, dan keputusan Menteri Agama RI No 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 (Fatimah n.d.:3). Setidaknya ada tiga pendapat mengenai sumber hukum ahli waris pengganti diantaranya, pertama yurisprudensi tentang ahli waris pengganti berasal dari *living law*, karena praktik ini sudah berlaku sejak dulu

dan cukup diterima di kalangan masyarakat Indonesia (Hajar 2016:55). Aturan mengenai ahli waris pengganti di dalam hukum adat sebetulnya telah ada di dalam hukum perdata (BW) sejak 1847 pada pasal 841 dan 842 (Hajar 2016:55). Ahli waris pengganti di dalam KUH Perdata dikenal dengan istilah penggantian tempat atau di dalam bahasa Belanda disebut dengan *Plaatsvervulling*. Aturan Penggantian tempat ini diatur dalam pasal 854 sd 857. Penggantian ini juga diberikan kepada setiap orang dalam setiap derajat dan segala hak orang yang digantikan seperti yang diatur dalam pasal 841 KUH Perdata dan pasal 842 ayat 1 KUH Perdata.

Kedua, pendapat lain mengatakan bahwa sumber dari aturan ahli waris pengganti di dalam KHI adalah mengikuti langkah Pakistan. Munculnya istilah ahli waris pengganti di Indonesia yang ada di dalam KHI adalah mengikuti langkah Pakistan yang telah menetapkan status cucu di dalam MFLO *chapter 4* pada tahun 1946 (RI 1993:50–51). Pendapat ini dapat dibenarkan karena yurisprudensi ahli waris pengganti di Pakistan lebih dulu dibandingkan Indonesia. Pakistan telah lebih dahulu merumuskan Ahli waris pengganti dalam Chapter 4 pada tahun 1961. *Ketiga*, menurut Daud Ali, ahli waris pengganti diambil dari pendapat Hazairin. Pendapat Hazairin didasari atas penerjemahan ayat al-Qur'an dan setelah itu KHI mengadopsi istilah ahli waris pengganti (Fatimah n.d.:4). Seperti yang terjadi di Pakistan, ahli waris pengganti di Indonesia sempat menuai kecaman. Hal ini merupakan pembaruan yang dianggap merusak tatanan waris. Menurut Habiburrahman dalam disertasinya di UIN Sunan Gunung Jati bahwa ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI harus dihapus. Hal ini didasarkan atas pendapatnya yang menganggap bahwa ahli waris pengganti

bertentangan dengan al-Quran dan sunnah. Dia juga menambahkan bahwa hasil penafsiran yang dilakukan oleh Hazairin tidak berbeda dengan teori *receptie* yang telah diadopsi di dalam BW yang hanya menyesuaikan hukum yang telah berlangsung di masyarakat (Akhmad Sukris Sarmadi 2013:67).

Aturan mengenai ahli waris pengganti tertera di dalam KHI Pasal 185 yang berbunyi: “(1) *ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti*”. Para ahli hukum dan hakim mempersoalkan isi pasal ini. karena pasal ini dianggap tidak jelas sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah terlalu luasnya cakupan ahli waris pengganti. Karena ahli waris yang mengganti akan memiliki posisi, derajat dan hak yang sama dengan yang digantikan. Jika merujuk ke pasal 173 maka yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak, baik laki-laki atau perempuan, anak laki-laki dan perempuan dari saudara, baik saudara laki-laki atau perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari paman.

Pada Rapat Kerja Nasional MA RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding yang diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 10-14 Oktober 2010 dengan tema “Dengan Semangat Perubahan Mempeloporkan Landasan Menuju Peradilan yang Agung” telah menghasilkan beberapa kesimpulan terkait ahli waris pengganti. Pada angka 5 huruf B ditegaskan bahwasanya adanya pembatasan ruang lingkup bagi ahli waris pengganti. Dengan rumusan: ahli waris pengganti dengan

sebagaimana yang diatur di dalam pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Berdasarkan pembatasan ini berarti hanya cucu yang dapat menjadi ahli waris pengganti. Untuk itu, kerabat lain seperti anak dari keponakan saudara sepupu dan yang lainnya tidak dapat menjadi ahli waris pengganti (Zahari 2014:334).

Tujuan dari pembatasan yang dilakukan ini tidak diketahui secara pasti, akan tetapi dengan melihat pendapat para praktisi dan para hakim pengadilan agama dapat diduga bahwa tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk menjaga harta waris agar tidak banyak terbagi. Ketentuan dalam Pasal 185 KHI yang dipandang terlalu luas cakupannya sehingga perlu dibatasi demi rasa keadilan dan cukup dilakukan oleh para hakim dalam penerapannya tanpa harus merubah pasal yang telah ada. Pembatasan ini dianggap perlu, karena apabila ahli waris pengganti ini tidak dibatasi maka akan banyak ahli waris yang mendapatkan harta waris sehingga mengurangi harta waris bagi ahli waris yang asli. Jika dilihat pada pasal 174 ayat (1) dikatakan bahwa jumlah ahli waris hanya ada 11. Dan apabila ahli waris pengganti ini tidak dibatasi maka jumlah dari ahli waris dapat mencapai 41 orang. 22 diantaranya adalah laki-laki dan 19 ahli waris perempuan.

Hukum Waris, Statis atau Dinamis?

Dari beberapa contoh di atas dapat dilihat bahwa pembaruan dalam waris pada masa sahabat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada. Menurut Hazairin produk hukum waris yang dihasilkan oleh para sahabat penuh syarat akan tradisi kekerabatan patrilineal. Melihat kasus-kasus di atas seperti *Akdariyyah*, *Umarriyatin*, *hajarriyyah* dapat dilihat bahwa ijtihad yang mereka lakukan adalah demi memberikan hak

yang lebih terhadap laki-laki, atau paling tidak memberikan hak lebih terhadap saudara kandung dari saudara seibu. Kontruksi patrilineal pada hukum waris Islam merupakan buah dari ijtihad dari para sahabat dan ulama setelahnya. Ketika para fuqaha merumuskan hukum waris, mereka secara tidak langsung mengambil sumber ekstratekstual berupa adat atau *'urf* pada saat itu. Singkatnya produk fikih ataupun produk tafsir mengenai ayat waris para fuqaha selama ini penuh syarat akan pengaruh patrilineal. Hal ini lah yang mengakibatkan hukum waris sulit untuk diterima di era modern ini. Bagi Hazairin mengonstruksi ulang ayat waris perlu dilakukan dengan semangat yang di usung oleh Qur'an, yaitu semangat bilateral. Menurutnya, dengan menerapkan pemahaman bilateral dalam memahami waris dalam nash maka hukum waris akan lebih mudah diterima di beberapa negara Islam khususnya di Indonesia.

Pada era kolonial, setelah terpecahnya *daulah Islamiyyah* menjadi negara-negara oleh Barat mengakibatkan adanya perubahan hukum di setiap negara. Hukum yang awalnya bersumber dari kitab-kitab klasik karya para *fuqahâ'*, bergeser menjadi kodifikasi berupa undang-undang. Kodifikasi ini merupakan respon dari para cendekiawan muslim untuk melegitimasi hukum Islam sebagai aturan tetap negara. Akan tetapi dalam praktiknya, hukum yang dihasilkan dari kodifikasi di setiap negara Islam berbeda-beda. Salah satu faktor penyebab perbedaan ini adalah pengaruh dari sikap politik setiap negara dalam terhadap posisi hukum barat. Setidaknya sikap politik diantara negara-negara Islam dapat dibagi menjadi tiga, yang pertama mengakomodasi hukum-hukum Barat yang sesuai dengan hukum syariat, kedua mengadopsi keseluruhan hukum Barat,

ketiga menolak semua hukum Barat (Mudzhar and Nasution 1994:2).

Jika melihat dari apek sosiologis, faktor yang mendorong atas perubahan hukum adalah adanya perubahan sistem masyarakat. Pada era modern sistem kekeluargaan telah bergeser dari sistem keluarga besar (*extended family*) menuju sistem keluarga inti (*nuclear family*) (Wahib 2014:42). Perubahan sistem keluarga seperti ini mengakibatkan adanya dorongan perubahan terhadap sistem waris yang telah berlaku sejak dulu. di dalam sistem keluarga besar, solidaritas dan tanggung jawab sesama suku lebih besar jika dibandingkan dengan sistem keluarga kecil, maka dari itu aturan waris klasik sangat cocok karena tidak hanya melibatkan orang tua dan anak tetapi juga melibatkan kerabat lainnya.

Di era modern ini negara-negara muslim telah melakukan pembaruan dalam hukum waris, salah satunya adalah hak waris bagi cucu. Persoalan cucu yang tidak mendapatkan harta waris karena tertutup oleh saudara menjadi keresahan di setiap negara muslim. Persoalan cucu ini tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat yang menganut sistem *extended family*, karena cucu ini akan menjadi tanggung jawab keluarga besar. Akan tetapi untuk masyarakat modern yang menganut sistem keluarga *nuclear family* perlu adanya pembaruan hukum untuk mengatasi masalah ini. Beberapa negara muslim melakukan *ijtihad* untuk menyelesaikan persoalan cucu yang *mahjub* agar mendapatkan harta. Setidaknya dari beberapa pembaruan hukum ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok, mayoritas menggunakan wasiat wajibah dan sebagian menggunakan metode ahli waris pengganti.

SIMPULAN

Pembaruan di dalam hukum Islam merupakan sebuah keniscayaan sekalipun di dalam persoalan waris. Jika melihat pada fakta sejarah, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum waris tidak hanya terjadi di era modern ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman *tâbi'in* bahkan sejak era sahabat. Pembaruan hukum waris pada era sahabat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat Arab pada masa itu, yaitu sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan pembaruan hukum waris di era modern dipengaruhi oleh beberapa Faktor, *pertama* adanya perbedaan sikap politik di setiap negara muslim terhadap posisi hukum barat. *Kedua* ijtihad yang dilakukan oleh setiap negara berbeda. Hal ini dikarenakan setiap negara muslim telah menetapkan mazhab yang berlaku di negaranya, sehingga hukum yang berlaku akan disesuaikan dengan mazhab di setiap masing-masing negara. *Ketiga*, adanya perubahan struktur sosial di masyarakat yang sebelumnya menganut sistem *extended family* menjadi *nuclear family*. Perubahan sistem kekeluargaan ini juga berdampak pada hukum waris yang telah mapan.

Dengan melihat fakta sejarah dan fakta sosial dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum waris merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan hukum akan terus ada sejalan dengan perubahan struktur sosial. Perubahan hukum waris diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat, lebih jauh hukum waris akan selalu diterima di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A. Y. 1998. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*. INIS.

Akhmad Sukris Sarmadi. 2013. "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7(1).

Al-Bugho, Mustafa. 1992. *Al-Fiqhu Al-Manhajyyu 'Alâ Maṣṣhab Al Imâm Asy-Syafi'yyi*. Damaskus.

Dr Nasr farid muhammad Wasil-. n.d. *Madkhal Al-Wasit Li Dirasah Al-Shari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Fiqh Wa Al-Tasyri'*.

Fatimah, zahrah. n.d. "Term Kunci: Ahli Waris Pengganti, Keadilan Ala Indonesia, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia Pendahuluan Kajian Tentang."

Hajar, M. 2016. "Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam." 50(1).

Haryanto, Sri. 2017. "Historis dalam Studi Islam Sri Haryanto." *Manarul Quran* 17:127–35.

Hazm; Abi; Muhammad 'Alî ibn Aḥmad ibn sa'îd ibn. 1987. *Al-Muḥalla*. Abi, Muhammad 'Alî ibn Aḥmad ibn sa'îd ibn Hazm, al-Muḥalla, (Dâr al- Fikr: 1987), jilid 9: hlm. 312.: Dâr al- Fikr.

Hidayati, Sri. 2012. "Ketentuan Wasiat Wâjibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12(1):81–90. doi: 10.15408/ajis.v12i1.982.

Ishak, A. 2013. "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam." *Al-Mizân* 9(1):62–76.

Kocinkag, Mansur. 2018. "Risalah Al Faraid Li Zaid Ibn Tsabit Ma'a Syarhiha Li Abi Zinad." *Terkidag Ilahiyat Dergisi* (1):329–53.

Mudzhar, Mohamad Atho, and Khoirudin Nasution. 1994. "Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern." *Mimbar Hukum* 12.

Munir, Muhammad. 2014. "Reinventing the Islamic Law of Inheritance: The Share of Orphaned Grandchild in Islam and Pakistani Legal System." *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.2430826.

Muslim, Imamm. 2006. *Shahih Muslim*.

Nisâburiy, Imam Abi Husain Muslim bi Hajâj al-Quraissy an-. 2000. *صحيح مسلم*. Pdf. al-mamlukiyyah Al-'Arabiyyah As-Su'udiyyah: Darussalam.

Qublan, Hisyam. 1971. *Wasbiyyah al-Wâjibah Fi Al-Islam*. Beirut-Lebanon: Mansyurat Baḥr al-Mutawasit.

Raihan. 2019. *Metodologi Penelitian*. Vol. 53.

RI, Departemen Agama. 1993. *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Ditbinpera, Departemen Agama RI.

Sayyid, As-sabiq. 2004. *Fiqh As-Sunnah*. Cairo: Dar Al Hadis.

Wahbah, Az-Zuhaili. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâr al-Mustafâ.

Wahib, Ahmad Bunyan. 2014. "Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48(1):29–54.

Zahari, Ahmad. 2014. "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Khi Oleh Rakernas Mahkamah Agung Ri Di Balikpapan Oktober 2010." *Jurnal Dinamika Hukum* 14(2). doi: 10.20884/1.jdh.2014.14.2.300.

Zuhdi, Syaifuddin, S. Hi, and M. Hi. 1972. "Kata Kunci: Reformulasi, Hukum Keluarga, Perceraian, Pakistan." 41–53.